

PERANAN ELIT LOKAL MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2017 DI DESA SOPI MAJIKO KECAMATAN MOROTAI JAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA¹

Oleh : DESTINA LUMENDEK²

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu system pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik. Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus saling bekerja sama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, persaingan antar elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Seperti yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Melihat kontes politik lokal Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku. Elit lokal masih cenderung mempergunakan kuasanya untuk mempengaruhi masyarakat, pada setiap pemilihan umum kepala daerah, ini terjadi karena adanya kepentingan antara kedua belah pihak baik elit lokal maupun masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Elit Lokal, Masyarakat, Pilkada.

ABSTRACT

Direct election of Regional Heads is the most important part of democracy in Indonesia. The holding of a direct democracy party can be viewed as the flexibility or flexibility of the reform government in responding to the demands of the community about the need for a government system that gives a greater role to the community in the region, namely a non-centralized government system. Democracy is a process towards good civilization. Elections for regional heads and DPRD, local politics in Indonesia show a political phenomenon that seems contradictory to the political elites competing fiercely, but at the same time work together. As a result, there has never been opposition on the local political stage. This happens because competition in elections has become a collaboration in the implementation of

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

government. Thus, competition between local political elites can be interpreted as a situation that confirms their political differences in order to articulate the collective interests of the social groups that they are trying to represent. Local elections are always marked by the role of local elites. Understanding the influence of local elites on the community in the Election process is an important aspect in anticipating negative impacts on the community. Elite is a term that we often hear, not only in political activities but also in social activities. As we know, elites everywhere are bound to have a power to carry out an activity or action. Seeing local political contests at the Regent and Deputy Regent General Election in Sopi Majiko Village, Kec. Morotai Jaya, Kab. Morotai Island, Prov. Maluku. Local elites still tend to use their power to influence the community, in each general election it is regional, this occurs because of interest between the two parties, both local and community elites.

Keywords: Role, Local Elites, Community, Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistik.

Demokrasi adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena membutuhkan kedewasaan berpolitik serta sarana dan prasarana yang terdukung mantap demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik. Oleh karena itu membangun demokrasi berarti membangun peradaban itu sendiri. Pada jaman sekarang ini demokrasi menjadi populer dan hampir diterima secara universal karena dianggap sebagai sistem politik yang baik dalam memajukan kemanusiaan.

Demokrasi atau pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor yang umum dikenal dewasa ini seperti; adanya sistem perwakilan, adanya pemilihan umum secara berkala, adanya keterbukaan dan adanya pengawasan sosial (*social Cotrol*) dari rakyat atau masyarakat, Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai “pemerintahan dari bawah”, “pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat”, “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” atau “pemerintahan oleh orang banyak”. Adapun yang dimaksud dengan “bawah” disini adalah rakyat yang dalam hal ini adalah sebagian besar atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut menentukan serta mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang disediakan untuk itu pada peringkat infrastruktur politik. PILKADA dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal.

Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus saling bekerja sama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, persaingan antar elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili.

Pilkada langsung sebagaimana diketahui bersama merupakan bentukan dari proses desentralisasi di Indonesia berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan itu Sistem Pemilihan Kepala Daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur secara langsung, di satu sisi merupakan media pengembangan demokrasi, namun di sisi lain merupakan potensi bagi munculnya konflik kepentingan antar berbagai elemen masyarakat terutama antar elit lokal di daerah. Kasus di beberapa daerah di Indonesia, pelaksanaan.

Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Awal kemunculannya ialah karena kritik keras terhadap politik sosialisme (sosialisme marxis). Teori ini juga di arahkan untuk aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai “elit penguasa” yang dipertentangkan menentang gagasan demokratis dan sebagai bentuk sinisme terhadap aristokrat.

Elit merupakan orang-orang yang sukses dan yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan adalah konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya.

Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu atau sekelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat itu, walau perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia ataumereka mainkan.

Satu individu atau sekelompok individu inilah yang lazim disebut Elite. Tegasnya, elite adalah orang-orang yang karena kelebihanannya memiliki pengaruh serta mendapatkan status dan kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.

Pemilukada dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengkomudir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut.

Melihat lebih seksama konteks politik lokal Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku, elit lokal masih cenderung mempergunakan kuasanya untuk mempengaruhi masyarakat, pada setiap pemilihan umum kepala daerah, ini terjadi karena adanya kepentingan antara kedua belah pihak baik elit lokal maupun masyarakat,

di lihat dari latar belakang ekonomi atau mata pencaharian masyarakat yang ada, khususnya masyarakat Desa Sopi Majiko Mayoritas adalah petani kopra.

Popularitas elit tradisional seringkali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam kerja menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1173).

Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Elit Lokal

Suzanne Keller Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal.

Keller berpendapat bahwa konsep elite yaitu elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang mengenai diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya. Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama.

Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit (Keller, 1995:31). Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit politik. Berikut adalah beberapa pengertian tentang elite. Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik

dalam system politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga negara.

Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa. Elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat, dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keller mengungkapkan bahwa elit yang berpengaruh dalam kondisi masyarakat yang modern dan dalam nuansa heterogenitas disebut elit strategis. Dalam kondisi modern, elit strategis dilengkapi dengan kemampuan yang mumpuni di berbagai segmen. Dalam penelitian ini, elit tradisional dianggap sebagai elit strategis sebagai orang yang memiliki kemampuan berkuasa lebih tinggi dibanding masyarakat yang lain sehingga memiliki dampak penghormatan yang berlebih dari pengikutnya.

Pada dasarnya Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Dan dalam pengertian umum elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial.

Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakat. Dan, hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik.

Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non governing elite). Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Konsep pergantian elite juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian di antara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri dan di antara elite dengan penduduk lainnya. Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat.

Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri.

Sebaliknya, dari beberapa pemikiran di atas memberikan sebuah gambaran bahwa peranan elit dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Sebagai tokoh yang berpengaruh, elit dapat mendorong massa menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya. Pada dasarnya Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data didapatkan melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literature-literatur hasil penelitian sebelumnya, artikel, foto-foto dan bahan statistik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian (Sugiono, 2011;224).

Penentuan sumber data dan orang-orang yang diwawancarai yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu, dan masih bersifat sementara. Informan dalam hal ini adalah masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta pegawai dalam kantor kepala desa Sopi Majiko.

Fokus penelitian ini ialah Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017, di Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maka instrumen penelitian yang utama adalah penelitian sendiri. Kemudian dalam proses atau teknik

pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Analisis Sebelum di Lapangan, Analisis Data di Lapangan, dan Analisis Selama di Lapangan

PEMBAHASAN

Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017

Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya Pemilu langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat (Ahmad Nadir, 2005; 125).

Suzanne Keller Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa konsep elite yaitu elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang mengenai diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam bagi beberapa informan yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda terlihat bahwa peranan elit lokal Desa Sopi Majiko dalam proses pemilihan umum kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari beberapa faktor yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat berikut diuraikan yaitu :

1. Demokratisasi dan pembangunan civil society pada tingkat lokal

Menurut peneliti beberapa pemilu pasca reformasi telah terlihat bahwa demokratisasi di desa Sopi Majiko masih banyak terjadi penyimpangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok, masih banyak aktor-aktor politik atau para elit lokal berperan dengan menggunakan kuasanya demi mendapatkan dukungan suara. Hal ini sangatlah tidak sesuai dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan dan kesadaran demokratisasi di desa Sopi Majiko. Serta membutuhkan kesadaran politik bagi semua pihak yang terlibat.

Kemudian bagaimana pembangunan civil society di dalam masyarakat Sopi Majiko, ini sangat penting dalam pembangunan demokrasi. Sebab pembangunan harus dibangun diatas civil society yang kuat. Yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dan mampu menyampaikan hak-hak politik mereka, terutama partai politik tidak mampu lagi menjalankan amanat masyarakat. Partai politik tinggal menjadi kendaraan kepentingan beberapa kelompok elit dan bahkan dijadikan tameng bagi para elit politik yang korup. Untuk itu masyarakat sangat diperlukan untuk membangun dinamika politik yang baik.

2. Paradigma baru otonomi daerah

Untuk melihat dinamika politik lokal diperlukan paradigma baru dalam otonomi daerah, dengan membenahi paradigma otonomi daerah, maka politik lokal kita akan tetap terjebak pada desentralisasi kekuasaan dari elit politik pusat ketingkat elit politik lokal. Disini politik lokal akan banyak dipengaruhi oleh kontrak-kontrak politik. Akhirnya para elit politik lokal hanya berpikir untuk memperkaya diri dan melupakan

tanggung jawabnya dalam membawahi amanat rakyat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat umum dan bukan milik pribadi. Disini perlunya perumusan paradigma baru otonomi daerah sesuai dengan konteks hubungan pusat dan daerah.

3. Konflik Antar Elite Politik Lokal

Sistem politik transisional juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Masa transisi yang masih belum menunjukkan tingkat kemapanan dari segi prosedur dan proses politik yang menyebabkan terjadinya gejala persaingan yang tidak sehat dan konflik politik dalam perebutan kekuasaan. Sistem politik transisi dengan demikian dianggap ikut memberikan peluang bagi terjadinya eksperimen politik yang berbeda-beda ditingkat lokal serta memberi peluang. Apalagi ada gejala hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima oleh masa yang kontra maupun pemerintah pusat. Gejala cacat hukum dari hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima oleh massa yang kontra maupun pemerintah pusat. Gejala cacat hukum dari hasil proses politik menunjukkan kecenderungan seperti itu. Bila hal ini dieksploitasi dengan menggunakan massa dengan berbagai tipe diatas, bisa berubah positif maupun negatif. Tetapi, realitas politik lebih menunjukkan distorsi dari proses politik yang dapat berubah menjadi konflik Elite dan konflik horizontal.

Konteks lokal perlu dipahami sebagai salah satu faktor terjadinya konflik kekuasaan. Ini dapat dilihat dari konteks hubungan kultur dengan politik, hubungan organisasi massa dengan masalah politik, "ideologi politik" di masing-masing daerah dan arah kecenderungan afiliasinya serta perilakunya, demografi politik dan lain sebagainya. Arena politik ini seringkali berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam konstelasi politik kekuasaan di tingkat lokal.

Karena itu, konteks lokal juga dianggap penting pengaruhnya dalam sirkulasi "kekuasaan", baik dalam bentuk dukungan politik maupun sikap politik masyarakatnya serta kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan dalam konteks lokal seperti itu. Mengenai dukungan politik ini, teori tentang jaringan kekuasaan bisa digunakan sebagai alat analisis, karena di dalamnya dapat menjelaskan mengenai jaringan kekuasaan serta berbagai kepentingan di balik hubungan seperti itu.

Dalam konteks jaringan kekuasaan ini, pemikiran tentang patron-klien, bisa juga dipinjam untuk memperkaya kerangka pemikiran dalam menjelaskan mengenai perebutan kekuasaan di tingkat lokal. Termasuk dalam konteks itu adalah adanya penjelasan mengenai brokerbroker politik dalam konteks kekuasaan di tingkat lokal maupun hubungan secara kultural antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Pengaruh patron terhadap klien, bisa juga untuk menjelaskan mengenai mengapa massa bertindak tertentu dalam konteks konflik kekuasaan dan tidak mencoba untuk kritis terhadap pengaruh Elite. Budaya masyarakat dalam konteks hubungannya dengan seorang pemimpin bisa memberikan pula dukungan analisis, bahwa dalam konteks tertentu seorang pemimpin dalam rangka mencapai kekuasaan bisa juga menggunakan maknanya simbolik kebudayaan, etnisitas dan lain sebagainya.

Kerangka ini diperlukan sebagai upaya untuk menjelaskan mengenai kaitan kepemimpinan lokal dalam hubungan sosial dengan massa mereka. Hubungan timbal balik politik inilah menyebabkan mengapa massa begitu militan dan mudah dimobilisasi serta memberikan dukungan penuh kepada Elitenya dalam proses perjuangan politik.

4. Model resolusi konflik di tingkat lokal secara damai

Melihat hasil pilkada diberbagai daerah termasuk desa Sopi Majiko 2017. Konflik lokal merupakan potensi yang sangat berbahaya jika dibiarkan karena akan sangat merugikan banyak pihak dalam masyarakat. Untuk itu resolusi konflik harus dipikirkan dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan dinamika politik lokal kita akan berdampak pada terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran bagi aktor-aktor politik untuk memahami dan meminimalisir isu-isu sara yang dapat menciptakan konflik dalam masyarakat dan dapat menghancurkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian aktor-aktor politik dalam hal ini pemerintah dan partai politik serta elit ekonomi sebaiknya untuk mempelajari pola dan kecenderungan konflik yang terjadi didalam masyarakat desa Sopi Majiko. Karena dengan menemukan kecenderungan terjadinya konflik tersebut akan sangat memudahkan untuk menemukan solusinya dimasa mendatang dalam menyelesaikan konflik bila terjadi.

Melihat faktor-faktor yang terjadi diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang timbul dan harus dijawab adalah:

1. Kelembagaan dan hubungan antara lembaga politik di tingkat lokal

Perkembangan dinamika politik kita juga akan banyak ditentukan oleh faktor kelembagaan di dalam masyarakat Sopi Majiko misalnya lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta agama, adat, kelompok profesional, pengusaha, akademisi mahasiswa dan lain-lain. Jika lembaga tersebut bekerja sama dengan maksimal atau dapat berjalan semestinya, maka akan terrealisasi dengan baik pula.

Dan kemudian dipertanyakan adalah bagaimana hubungan antar lembaga dalam pembangunan dinamika politik desa sopi majiko? Dikhawatirkan adanya fungsi-fungsi kelembagaan yang tidak berjalan dengan sebenarnya, karena jika hubungan lembaga-lembaga tidak berjalan dengan tidak semestinya, maka dinamika politik lokal didaerah ini tidak berjalan dengan baik.

Dan akan sangata berbahaya karena akan terjadi kerja sama yang menyimpang antar lembaga sehingga akan sangat merugikan masyarakat. Dalam konteks itu baik aspek kelembagaan maupun aspek hubungan antar lembaga tersebut, desa Sopi Majiko diharapkan dapat memiliki kelembagaan yang kuat dan memiliki hubungan antar lembaga yang baik pula. Disini diperlukan kerja sama yang baik, sehingga terjadi politik lokal yang baik sesuai harapan masyarakat.

2. Perkembangan kelompok marijinal di tingkat lokal

Pentingnya dalam melihat dinamika politik lokal adalah perkembangan kelompok marijinal ditingkat lokal. Dalam hubungannya dengan desa Sopi Majiko apakah kelompok-kelompok marijinal ditingkat lokal sudah dilibatkan dalam ruang dinamika politik atau belum. Apakah suara mereka sudah masuk dalam agenda pengambilan kebijakan, apakah hak-hak mereka sudah diperhatikan jika kelompok marijinal dalam suatu kawasan belum tersentuh atau hak-hak politik mereka dalam dinamika politik lokal desa Sopi Majiko, maka akan terlihat bagaimana dinamika politik lokal kita telah gagal.

Beberapa daerah termasuk desa Sopi Majiko, kasus dalam setiap pemilihan umum kepala daerah secara langsung telah melahirkan kondisi sosial politik yang tidak menguntungkan untuk pembangunan desa Sopi Majiko, baik pemerintah maupun masyarakat kebanyakan. Bagi pemenang pemilihan umum kepala daerah langsung didesa Sopi Majiko kepemininan pasca pemilukada seakan disandra oleh para tim sukses yang merasa berjasa dan berhak.

Untuk melakukan maneuver atau dendam politik yang trjadi penyimpangan dalam masyarakat, terutama yang tidak sarah politik dengan keinginan mereka.

Beberapa contoh dengan para guru-guru terjadi penyimpangan dengan dilakukannya rencana roling tempat kerja, dilakukan dengan alasan penyegaran, atau pemindahan tempat kerja ditempat yang sangat jauh berpedalaman itu terjadi karena ada motif dendam dan sakit hati semasa pemilu. Persekutuan atau persengkokolan antar elit didalam pilkada langsung juga akan berdampak pada adanya penyimpangan dalam pembangunan daerah, baik antar lembaga maupun antar individu yang merasa berjasa dalam proses pilkada. Oleh sebab itu harus adanya kesadaran dari semua pihak baik lembaga maupun masyarakat dalam berpolitik dengan baik dan tidak menyimpang yang nantinya akan merugikan banyak orang terutama bagi masyarakat pada umumnya. Untuk menuju kesejahteraan bersama dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dalam masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para Elite Politik dan masyarakat yang ada di desa Sopi Majiko dalam bidang ekonomi adanya ketergantungan antara masyarakat dengan elit lokal yang ada di desa Sopi Majiko. Dengan modal ekonomi mampu membangun hubungan yang sangat kuat dan dekat antara keduanya. Selain itu peranan yang digunakan elit lokal desa sopi majiko dalam memperoleh dukungan suara yaitu mengandalkan status sosialnya, serta kemampuan kecerdasan, dan ketrampilannya yang sangat baik pada masyarakat serta bersikap ramah dalam setiap penampilannya di tengah-tengah masyarakat, tujuannya untuk mendapatkan hati masyarakat. tetapi ada juga yang melakukan penyimpangan dalam usaha memperoleh dukungan suara dengan menghalalkan berbagai macam cara dan jurus yang dapat dilakukannya untuk memperoleh dukungan suara.

Saran

Bagi pasangan calon kandidat serat tim suksesnya, harus adanya kesadaran dalam berpolitik yang sehat dan tidak ada kecurangan, serta menjaga etika dalam berpolitik. Agar terciptanya proses PILKADA yang jujur sehat dan aman. Agar supaya tidak terjadi konflik yang pastinyan sangat merugikan banyak orang, terutama mencegah terjadinya konflik secara horizontal dalam masyarakat pasca PILKADA berlangsung. Sedangkan bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih pergunakan hak pilih dengan sebaik mungkin, dengan melihat calon kandidat yang benar-benar berkualitas, mempunyai visi dan misi yang jelas, serta benar-benar bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab membawah amanat rakyat. Dengan dapat melakukan perubahan pembangunan dalam masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu bagi para kandidat Kepala Daerah serta tim suksesnya diharapkan mampu memberikan contoh serta pandangan yang baik kepada pendukungnya sebagai sosok yang siap menang secara baik (*good winner*) sekaligus sosok yang siap kalah juga dengan cara-cara yang baik (*goodloser*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nadir, 2005. *"Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi"*. Gresik, Averros Press.
- Abdulsyani. 2005. *Masyarakat: Dinamika Kelompok Kelompok dan Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung. Unila Press.

- Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiardjo Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik..* Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bottomore T B, 2006. *Elit dan Masyarakat*, Akbar Tanjung Institut Jakarta
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Kuskridho Ambardi, 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang System Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*, KPG (keputusan populer Gramedia), Jakarta.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Subandi . 2009 . *Ekonomi Koperasi*. Alfabeta . Bandung.
- Sugiyono, 2011: *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Syafiie Kencana Inu, 2010. *Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Udu, Sumiman. 2009. *Perempuan dalam Kabanti: Tinjauan Sosiofeminisme*, Yogyakarta: Diandra.
- Taylor dan Bogdan. 2012. *Prosedur Penelitian. Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber-sumber lain :

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.